

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Secara umum permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan disebabkan oleh dua faktor utama yang saling terkait yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti rendahnya motivasi, minimnya modal lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi serta etos kerja. Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan. Yang belum kondusif dalam aspek kelembagaan masih minim, infrastruktur dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuh kembangkan. (Sumodiningrat, 2002:66)

Permasalahan kemiskinan di Indonesia jelas tidak hanya milik pedesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dan sebagainya) tetapi juga masalah

perkotaan. Parsudi suparlan (1984) mengemukakan bahwa masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaanya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan.

Kemiskinan kota sebagai bagian dari kemiskinan nasional di Indonesia juga menjadi masalah yang harus ditangani. sebagai warisan dan historis sejak munculnya kota itu sendiri, perkotaan menjadi fenomena masalah sosial yang memprihatinkan, dengan tingkat penanggulangan yang lebih memprihatinkan, seolah-olah kemiskinan itu bersifat abadi, lestari dan tidak bisa dirubah lewat aksi maupun reformasi. Kota-kota di Indonesia yang sekilas kelihatan sebagai symbol kemajuan dan budaya yang lebih maju dan seharusnya demikian, ternyata masih dipenuhi oleh problem kemiskinan dengan segala masalah sosial yang disebabkan atau berdampingan dengan masalah sosial lainnya (Marliati, 2005).

Program-program pengetasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan seperti: pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampong, gerakan terpadu pengetasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataanya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran

perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti: desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). Lemahnya nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.

Hingga saat ini bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari persoalan sejak krisis berkepanjangan. Oleh karena itu PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat) hadir untuk melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) merupakan program pemerintah yang berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok setempat. Sehingga dapat terbangun sebuah gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

PNPM memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku, sikap, cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dan lain-lain) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, dan lain-lain). Oleh sebab itu, PNPM sebagai program penanggulangan di perdesaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program apakah akan terus berlanjut atau berhenti akan tergantung dengan tekad dan komitmen masyarakat sendiri.

Pada intinya dalam perspektif PNPM, penyebab tingkat pertama terjadinya kemiskinan adalah individu yang tidak baik dan murni. Apabila orang-orang yang tidak baik ini mendominasi institusi pengambil keputusan maka institusi itu akan menjadi institusi yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Apabila sudah seperti ini maka kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang tidak berpihak atau adil kepada masyarakat. Kebijakan yang seperti ini mengakibatkan kerusakan pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Dan hasil kerusakan pada keempat aspek ini adalah kemiskinan.

Dalam pelaksanaan PNPM ada dua tujuan hendak dicapai. Tujuan pertama ialah meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat agar mampu secara mandiri untuk mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kapasitas daerah dan mendorong kelompok peduli untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat agar tumbuh gerakan bersama untuk mewujudkan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan yang dinilai paling miskin di Indonesia diantaranya Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto termasuk salah satu yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI) karena lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian dalam desa tersebut tidak begitu dapat memberikan hasil sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam pada bank sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik.

Penulis disini mencoba melakukan penelitian karena program ini adalah untuk Desa yang memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu: kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kesenjangan antar wilayah. Sedangkan persoalan pengangguran lebih di picu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus

menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap peneliti pasti mendapatkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mengetahui pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Untuk membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat digunakan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya.